

RESPON RUSIA TERHADAP SANKSI YANG DIBERLAKUKAN OLEH NATO PASCA-ANEKSASI CRIMEA

Soelistyo Bawono¹

1. Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The Crimea referendum decision was considered an illegal decision, and was considered an annexation attempt by Russia. Many countries do not recognize and even condemn the results of the referendum, but Vladimir Putin is not afraid and even continues to sign the law legalizing Crimea as part of Russia. The United States is one of the countries most opposed to the results of the referendum, as a form of disapproval of the United States to the referendum which is considered illegal. The United States imposes sanctions in the form of an economic embargo on Russia, with the intention of weakening Russia from its economic sector, the United States even cooperates with the European Union with a view to narrowing Russia's trading partners, of which the European Union is Russia's largest trading partner, Russia will thereby lose its market in the European Union. The embargo given by the United States to Russia was in the form of: Prohibition of Visas and Freezing of Assets for Russian officials and businessmen, as well as for Russian-owned companies, embargoes in the sector of Sanctions in Russia's financial, industrial and defense sectors, as well as expulsion of Russia from membership G-8. This made Russia implement several foreign policies to overcome these sanctions. This research will further discuss how the foreign policy issued by Russia. Researchers use the neorealism approach, the concept of national interest, and the concept of international cooperation. These concepts will later assist researchers in strengthening research assumptions from existing data. The method used for this research is a qualitative research method.

Keywords : Foreign Policy, Sanctions, Crimea, Embargo, Russia, European Union

ABSTRAK

Keputusan referendum Crimea dianggap sebagai sebuah keputusan yang ilegal, dan dianggap sebagai sebuah upaya aneksasi yang dilakukan oleh Rusia. Banyak negara yang tidak mengakui bahkan mengancam hasil referendum tersebut, namun Vladimir Putin tidak gentar bahkan ia tetap menandatangani undang - undang yang mengesahkan Crimea sebagai bagian dari Rusia. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling menentang hasil referendum tersebut, sebagai bentuk ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap referendum yang di nilai ilegal tersebut Amerika Serikat memberikan sanksi berupa embargo ekonomi kepada Rusia, dengan maksud untuk melemahkan Rusia dari sektor ekonominya, bahkan Amerika Serikat menggandeng Uni Eropa dengan maksud untuk mempersempit mitra dagang Rusia, yang mana Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Rusia, maka dengan demikian Rusia akan kehilangan pasarnya di Uni Eropa. Embargo yang di berikan oleh Amerika Serikat ke Rusia tersebut berupa : Larangan Visa dan Pembekuan Aset bagi pejabat dan pengusaha Rusia, serta bagi perusahaan – perusahaan milik Rusia, embargo di sektor Sanksi di sektor finansial, industri dan pertahanan Rusia, serta di keluarkannya Rusia dari keanggotaan G-8. Hal ini membuat Rusia mengularkan beberapa kebijakan luar negeri untuk mengatasi sanksi tersebut. Penelitian ini akan lebih lanjut membahas bagaimana kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Rusia. Peneliti menggunakan pendekatan neorealisme, konsep kepentingan nasional, dan konsep kerjasama internasional. Konsep-konsep ini nantinya akan membantu peneliti dalam memperkuat asumsi peneliti dari data-data yang telah ada. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Sanksi, Crimea, Embargo, Rusia, Uni Eropa

PENDAHULUAN

Krimea merupakan sebuah semenanjung yang terletak di bagian timur, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, sebelah utaranya berhubungan dengan Ukraina, sedangkan di sebelah timur semenanjung ini hampir menyambung dengan daratan Rusia. Secara de jure (hukum) Krimea merupakan wilayah dari negara Ukraina, namun secara darah keturunan wilayah ini sangat erat hubungannya dengan Rusia, karena sekitar 60 persen dari total penduduk Krimea berdarah Rusia.

Rusia pernah menguasai Krimea pada abad ke - 18 sampai abad ke – 20. Pada tanggal 19 Februari 1954, Presidium tertinggi Uni Soviet mengeluarkan dekret yang menyerahkan Krimea kepada Ukraina sebagai hadiah menandai 300 tahun Ukraina menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 tersebut, baik Rusia maupun Ukraina sama – sama menginginkan Krimea. Namun pada Desember 1991, Rakyat Krimea memilih untuk bergabung dengan Ukraina. Setahun kemudian, 1992, para politisi pro Rusia di Krimea berkampanye menginginkan bergabung dengan Rusia, kemudian masalah ini dapat diakhiri pada tahun 1997 dengan ratifikasi Kesepakatan Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan, yang menegaskan Moskow mengakui integrasi wilayah dan perbatasan Ukraina (Noorkusuma, 2017)



Gambar 1. Peta Rusia, Ukraina, dan Krimea

Sumber: Kompasiana

Kisruh di Ukraina bermula pada 21 November 2013 setelah seruan demonstrasi yang meminta integrasi yang lebih erat dengan Uni Eropa meluap. Hingga seruan demonstrasi ini meluas menjadi seruan agar Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan pemerintahannya mengundurkan diri dari jabatannya (Lyubchenko, 2017). Hal tersebut dikarenakan Presiden Victor Yanukovych dalam setiap kebijakannya lebih cenderung pro terhadap Rusia, diantaranya ialah pada tanggal 21 April 2010 Victor Yanukovych menandatangani perjanjian Naval Base yang isinya Rusia dapat memperpanjang sewa Sevastopol yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Rusia yang berada di Krimea, sepanjang 25 tahun kedepan sampai tahun 2024, dan tambahan ekstra 5 tahun, sampai

2047, dengan imbalan Ukraina mendapatkan kontrak multi diskon dalam pembelian gas alam Rusia. Puncak kemarahan masyarakat Kiev ketika pada tanggal 17 Desember 2010 Victor Yanukovych menandatangani dana talangan sebesar US\$ 15 miliar dari Rusia, untuk menanggulangi krisis ekonomi di eropa, dan mengabaikan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa yang akan dilakukan di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lithuania.

Pasca digulingkannya Presiden pro Rusia Victor Ynukovych, Presiden Rusia, Valdimir Putin mengambil langkah gesit dengan menuntut persetujuan Parlemen Rusia untuk menginvasi Ukraina dan pada tanggal 1 Maret 2014 Putin berhasil mendapat persetujuan Parlemen, Rusia melakukan maneuver militer dengan menerjunkan ribuan tentara ke wilayah otonom Krimea. Manuver ini langsung dikecam oleh Barat. Barat menganggap langkah Rusia tersebut sebagai agresi atas kedaulatan sah Ukraina dan melanggar hukum internasional . Pada bulan Februari 2014 lalu, Rusia melakukan tindakan yang telah menggemparkan dunia internasional, yaitu melakukan tindakan pencaplokan atau aneksasi sepihak terhadap Krimea. Aksi aneksasi yang dilakukan Rusia di semenanjung Krimea, wilayah Ukraina yang terdiri dari Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol, berawal dari adanya gerakan Euromaidan atau “Eurosquare”, dimana gerakan Euromaidan ini merupakan gelombang demonstrasi di Ukraina pada 21 November 2013 yang menginginkan Ukraina melakukan integrasi dengan Eropa .

Tindakan protes tersebut meluas menjadi seruan untuk memberhentikan presiden yang menjabat saat itu, yakni Presiden Viktor Yanukovych beserta pemerintahannya yang pro Rusia. Aksi protes juga memfokuskan pada isu ideologi dan geopolitik yang membagi negara ke dalam dua bagian, yakni “Barat vs Rusia” yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa melawan Rusia . Puncak aksi protes ini terjadi pada pertengahan Februari 2014 ketika aparat kepolisian merespon aksi protes para demonstran yang pro Barat, yang menginginkan adanya integrasi Ukraina dengan Eropa, dengan cara konfrontatif yang justru membuat gelombang protes semakin besar. Akibatnya, parlemen Ukraina kemudian memberhentikan Yanukovych dan menunjuk presiden sementara, Arseniy Yatsenyuk dan membentuk pemerintahan sementara. Pemerintahan baru itu mendapatkan pengakuan dari PBB dan Uni Eropa. Akan tetapi, hal ini ditentang oleh pihak Rusia.

Rusia memandang pemerintahan Presiden Yatsenyuk sebagai pemerintahan yang ilegal dan merupakan bentuk kudeta. Rusia bahkan memandang Amerika Serikat dan Uni Eropa turut campur tangan dalam mendanai dan mengarahkan “revolusi Ukraina” dengan pihak oposisi yang pro Barat, dimana Rusia menilai bahwa pihak oposisi tersebut selama bertahun-tahun menerima dukungan dan bantuan keuangan serta politik dari Amerika Serikat serta Uni Eropa. Rusia juga memandang bahwa pemberhentian Presiden Yanukovych bersifat ilegal dan tetap menganggap Yanukovych sebagai presiden Ukraina. Rusia pun kemudian memutuskan untuk melakukan intervensi militer di Ukraina. Intervensi militer Rusia di Ukraina meliputi serangkaian konflik bersenjata yang berujung pada pendudukan berbagai wilayah Ukraina termasuk Krimea .

Pasukan pro Rusia pun kemudian mulai menguasai semenanjung Krimea. Banyak yang mempercayai bahwa pasukan tersebut merupakan personel militer Rusia. Pada saat pasukan bersenjata tersebut menguasai gedung parlemen Krimea, anggota parlemen Krimea melakukan pemungutan suara untuk memberhentikan pemerintahan Krimea, yang kemudian dilanjutkan dengan mengganti perdana menteri dan menyerukan

referendum mengenai otonomi Krimea. Tak lama kemudian, pada 16 Maret 2014, dilaksanakan referendum mengenai sikap politik Krimea untuk bergabung dengan pemerintah Federasi Rusia dengan perolehan suara 96,77% (Krimea) dan 95,6% (Sevastopol). Referendum ini ditentang oleh Uni Eropa, AS, Ukraina dan warga Krimea karena dipandang bertentangan dengan hukum internasional. Parlemen Krimea mendeklarasikan kemerdekaan Krimea dan lepas dari Ukraina serta memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Meskipun referendum ini mendapatkan kecaman dari Uni Eropa, AS, dan dunia, Rusia dan Krimea tetap menandatangani perjanjian penggabungan Republik Krimea dan Sevastopol ke dalam Federasi Rusia. Pada April 2014, parlemen Ukraina mendeklarasikan Krimea sebagai wilayah yang sementara ini dianeksasi Rusia. Untuk mengatasi kekisruhan dan kekacauan politik, pada 25 Mei 2014, pemilu presiden digelar di Ukraina yang akhirnya dimenangkan oleh Petro Poroshenko, mengalahkan mantan PM Yulia Tymoshenko .

Intervensi Rusia di Ukraina berupa aneksasi Rusia terhadap wilayah Krimea untuk mempertahankan kekuatan dan kepentingan Rusia di wilayah Krimea, pun mendapatkan respon negatif dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menganggap Rusia bermaksud memecah belah wilayah Krimea, yang mana merupakan bekas wilayah Uni Soviet tersebut. Intervensi Rusia dalam masalah Ukraina yang melakukan aneksasi secara sepihak pun dinilai tidak sesuai dengan norma-norma internasional dan melanggar hukum internasional. Aneksasi Rusia terhadap wilayah Krimea berujung pada tindakan pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan salah satu instrumen power di bidang ekonomi berupa kebijakan sanksi ekonomi kepada Rusia.

Sanksi ekonomi tersebut berupa pembekuan aset Rusia di Amerika, dan larangan pemberian visa bagi pejabat Rusia yang terlibat langsung dalam intervensi militer Rusia di Krimea . Hal ini menjadi menarik bagi penulis atas tindakan Amerika Serikat yang lebih memilih memberlakukan kebijakan non militer berupa sanksi ekonomi dibandingkan kebijakan militer itu sendiri, mengingat Amerika Serikat memiliki power atau kekuatan di bidang militer ditunjukkan dengan posisi Amerika Serikat yang menempati urutan pertama dalam hal kekuatan militer di dunia, yang tentu semakin menekankan besarnya kapabilitas Amerika Serikat untuk melakukan kebijakan berupa intervensi militer di Ukraina. Sehingga dalam kasus aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia, Amerika Serikat memiliki pilihan untuk menggunakan kekuatan militernya untuk menandingi tindakan Rusia di Ukraina dan membatalkan aneksasi tersebut. Selain itu Amerika Serikat juga dapat melakukan deterrence kepada Rusia dengan menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Tindakan ini dapat memberikan tekanan kepada Rusia sehingga akan lebih mudah untuk melakukan negosiasi mengenai pengembalian semenanjung Krimea menjadi wilayah Ukraina lagi.

Mayarakat pro Rusia di Krimea menuntut untuk dilakukannya referendum. Sebanyak 1,5 juta rakyat Krimea mengikuti referendum untuk menentukan masa depan mereka, pada tanggal 16 Maret 2014, rakyat Krimea diberi dua opsi dalam referendum itu, yakni bergabung dengan Rusia atau tetap bersama Ukraina, namun dengan otonomi luas. Hasil dari referendum tersebut menyebutkan 70 persen warga Krimea ingin bergabung dengan Rusia, dan 11 persen menginginkan tetap bergabung kedalam kedaulatan Ukraina. Keputusan referendum tersebut dianggap sebagai sebuah keputusan yang illegal, dan dianggap sebagai sebuah upaya aneksasi yang dilakukan oleh Rusia.

Banyak negara yang tidak mengakui bahkan mengecam hasil referendum tersebut, namun Valdimir Putin tidak gentar bahkan ia tetap menandatangani undang - undang yang mengesahkan Crimea sebagai bagian dari Rusia. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling menentang hasil refrenfum tersebut, sebagai bentuk ketidak setujuan Amerika Serikat terhadap referendum yang di nilai illegal tersebut Amerika Serikat memberikan sanksi berupa embargo ekonomi kepada Rusia, dengan maksud untuk melemahkan Rusia dari sector ekonominya, bahkan Amerika Serikat menggandeng Uni Eropa dengan maksud untuk mempersempit mitra dagang Rusia, yang mana Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Rusia, maka dengan demikian Rusia akan kehilangan pasarnya di Uni Eropa.

Embargo yang di berikan oleh Amerika Serikat ke Rusia tersebut berupa : Larangan Visa dan Pembekuan Aset bagi pejabat dan pengusaha Rusia, serta bagi perusahaan – perusahaan milik Rusia, embargo di sector Sanksi di sector financial, industri dan pertahanan Rusia, serta di keluarkannya Rusia dari keanggota G-8 Rusia pun pada akhirnya harus membayar mahal upaya agresinya tersebut dengan rontoknya nilai mata uang rubel terhadap euro dan dolar sebagai akibat dari embargo ekonomi tersebut. Untuk pertama kalinya rubel turun dibawah 50 rubel terhadap euro, dengan 51,20 rubel setara dengan 1 euro, kemerosotan nilai tukar pun terjadi pada nilai tukar rubel pada dollar AS dimana nilai 37 rubel setara dengan 1 dollar AS. Adanya embargo dari berbagai pihak seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa membuat Rusia perlu mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk menghadapi embargo tersebut. Dari latar belakang masalah yang sudah di paparkan diatas maka penelitian ini akan mengangkat judul “**Respon Rusia Terhadap Sanksi Yang Diberlakukan Oleh Nato Pasca-Aneksasi Crimea**”

KERANGKA ANALITIK

Neo-Realisme

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan neorealisme, karena neorealisme dianggap mampu menjawab apa faktor pendorong kerja sama antara Rusia dengan beberapa negara lain seperti Tiongkok karena memiliki sebuah kepentingan yang sama yaitu untuk melawan AS, sehingga mendorong negara - negara untuk melakukan kerja sama. Memaksimalisasi power dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri yang bersebrangan dengan AS dan UE merupakan sebuah respon terhadap adanya sanksi yang diberikan oleh AS dan UE pasca aneksasi Krimea. Hal tersebut semuanya sesuai dengan asumsi - asumsi neorealis bahwa sistem internasional bersifat anarki, karena tidak ada otoritas sentral untuk memaksakan tata tertib. Lalu, dalam sistem internasional ini, kepentingan utama negara adalah keberlangsungannya negara itu sendiri, sehingga negara akan memaksimalkan power. Sebagai suatu negara yang berada dalam sistem internasional, Rusia mengambil peranan penting dalam upaya BoP dengan memaksimalkan kepentingan negara khususnya dalam bidang ekonomi dan kerjasama dalam upaya *struggle for power*.

Kepentingan Nasional

Kajian mengenai Rusia dan mengenai kebijakan yang terdapat faktor luarnya, analisis atas permasalahan tersebut, kerangka konsep yang kami gunakan adalah konsep

kepentingan nasional. Menurut Jack C Plano dan Roy Olton dalam buku *The International Relations Dictionary*, mengatakan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman para pengambil keputusan/decision makers dalam menentukan suatu kebijakan. Kepentingan nasional sendiri merupakan salah satu teori yang umum dipakai dalam menganalisis masalah dalam hubungan Internasional. Menurut Hans. J Morghentau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain.

Kerja Sama Internasional

kerjasama internasional menurut Holsti terjadi dikarenakan dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan suatu, atau persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau bertukar kepentingan; dan transaksi antar negara untuk mencapai tujuan mereka. Kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, maka kerjasama internasional yang terjadi antara Rusia dengan beberapa negara lain seperti Tiongkok, merupakan kerjasama yang ditujukan untuk kepentingan kedua Negara. Sedangkan menurut Rudy, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional anarkis ini. Konsep Kerjasama Internasional menurut peneliti merupakan konsep yang memaparkan tentang interaksi antar negara dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Konsep ini digunakan peneliti dikarenakan peneliti melihat konsep kerjasama internasional dapat mengurai kerjasama yang dilakukan oleh Rusia dan Tiongkok yang hubungannya semakin menguat pasca adanya embargo dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara Rusia dengan Tiongkok. Kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, maka kerjasama yang terjadi antara Rusia dan Tiongkok terbentuk karena adanya kepentingan bersama. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka masalah yang mendasari adanya kerjasama Rusia-Tiongkok adalah adanya permasalahan atas embargo yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat pasca aneksasi Krimea 2014.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk menuliskan maupun untuk menggambarkan apa yang

terlihat, dan apa yang dialami oleh peneliti sendiri selama proses penelitian. Dengan maksud untuk mengungkapkan, menelaah dan juga menganalisis permasalahan dengan menggambarkan peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif dimulai dengan adanya asumsi dari peneliti yang menggunakan sebuah kerangka penafsiran atau teoritis yang kemudian membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan.

PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional Rusia atas Aneksasi Krimea

Krimea, Laut Hitam, dan Rusia

Semenanjung Krimea adalah sebuah daratan di bagian selatan Ukraina dengan luas sekitar 26.100 km² yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh Laut Hitam dan Laut Azov. Pada abad ke-13 Golden Horde Mongol menaklukkan Krimea dan kemudian berturut mengalami Islamisasi pada awal abad-ke-14, dan kemudian berubah menjadi Khanat Krimea yang menjadi bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah pada abad ke-15. Akhir abad ke-18 Krimea berada di bawah penguasaan Tsar Rusia kemudian berlanjut hingga masa Uni Soviet dan pada tahun 1954 menjadi milik Ukraina hingga tahun 2014. Krimea hari ini sebagian besar didominasi etnis Rusia dan dua etnis lainnya yakni Ukraina dan Tatar. Krimea memiliki keunggulan pariwisata dan agrikultur namun sangat bergantung pada Ukraina terkait pasokan listrik, air, dan berbagai produk industri. Terdapat kandungan minyak dan gas yang besar di lepas pantai Krimea dan sebagian belum tereksplorasi.

Kedua entitas politik memiliki hubungan yang kuat dan komprehensif mulai dari isu politik, militer, ekonomi, hingga identitas. Krimea merupakan wilayah dengan persentase etnis Rusia terbesar (58%) dan juga penutur bahasa Rusia terbesar (77%) di Ukraina. Romantisme sejarah dan tendensi politik Krimea yang Kremlin-oriented berimplikasi pada kebijakan interventif Rusia terhadap Krimea. Sebagian besar rakyat dan anggota parlemen beserta pejabat eksekutif Krimea menginginkan Rusia sebagai fokus kebijakan luar negeri ketimbang Uni Eropa ataupun Amerika Serikat. Kota Sevastopol yang berada di barat daya Krimea merupakan lokasi pangkalan utama Armada Laut Hitam Rusia. Setidaknya belasan ribu personil dan puluhan kapal perang Rusia berada di Krimea. Penempatan militer Rusia di semenanjung tersebut sering kali menjadi daya tawar baik bagi Rusia dalam diplomasinya terkait beberapa isu terutama mengenai kesepakatan jual-beli dan tarif sewa pipa gas.

Kawasan Laut Hitam yang didefinisikan sebagai kumpulan enam negara pantai di sekeliling Laut Hitam: Turki, Bulgaria, Rumania, Ukraina, Rusia, dan Georgia serta tiga negara sekitarnya yang sangat berkaitan dengan enam negara diatas: Moldova, Azerbaijan, dan Armenia. Keamanan di kawasan laut hitam begitu kompleks karena mencakup berbagai konteks, baik keamanan militer, politik, energi maupun identitas. Kawasan ini juga berbatasan dengan lima kawasan sekaligus, yaitu: Asia Tengah, Timur Tengah, Balkan, Eropa Timur, dan Kaukasus. Rusia merupakan aktor utama kawasan tersebut dan menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri sejak era Uni Soviet. Kepentingan Rusia di kawasan laut hitam dapat dirumuskan sebagai berikut:(1) Meraih

kembali posisi sebagai aktor utama di kawasan Laut Hitam; (2) Mencegah munculnya aktor-aktor atau proyek yang dalam hal energi tidak berada dalam kendali langsung atau tak langsung Rusia; (3) Mencegah munculnya koalisi militer yang anti-Rusia; (4) Mencegah akses negara-negara di kawasan Laut Hitam ke keanggotaan NATO; (5) Memerangi dan menekan aksi separatisme, fundamentalisme, dan terorisme; (6) Menghalangi integrasi negara-negara di kawasan laut hitam ke dalam Uni Eropa .

Aneksasi Rusia terhadap Semenanjung Krimea tahun 2014 membuat perhatian internasional untuk kesekian kalinya tertuju pada Armada Laut Hitam Rusia (Black Sea Fleet). Armada tersebut merupakan salah satu instrumen kepentingan Rusia di kawasan tersebut. Setidaknya ada empat alasan yang mendasari hal tersebut: Pertama, Krimea merupakan lokasi utama pangkalan Armada Laut Hitam Rusia; kedua, proses aneksasi melibatkan armada tersebut; dan yang paling penting; ketiga aneksasi akan memberikan kesempatan bagi peningkatan kuantitas dan kualitas yang sangat signifikan pada Armada Laut Hitam Rusia, dan keempat, aneksasi berhasil memberikan Armada Laut Hitam Rusia sebuah tempat yang secara strategis merupakan yang terkuat di kawasan laut hitam .

Ekspansi NATO ke wilayah Eropa Timur

Ekspansi barat dalam segala bidang, terutama dalam hal politik, militer dan ekonomi merupakan ancaman paling utama dalam konteks keamanan regional kawasan laut hitam. Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam NATO dan Uni Eropa atau organisasi lainnya yang merupakan subordinasi dari kedua organisasi tersebut merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam ekspansi tersebut. Ekspansi NATO ke laut hitam pada bermula dari kebijakan Amerika Serikat dan sekutunya terutama di Eropa untuk melaksanakan operasi perdamaian dan pemberantasan terorisme di Afghanistan pasca tragedi WTC 11 September 2001. Untuk mendukung operasi tersebut, logistik dibawa melalui penerbangan yang melewati negara-negara yang berada di Eropa Timur, kawasan Laut Hitam, dan Asia Tengah. Khusus untuk kawasan Laut Hitam, Turki, Bulgaria, Rumania, Ukraina, Moldova, Georgia, dan Azerbaijan menunjukkan dukungan mereka terhadap AS dan NATO. Dukungan ini selain diberikan dalam bentuk izin penggunaan wilayah udara juga mencakup pengarahannya bantuan tentara dan penggunaan pangkalan militer .

Formalisasi dan legalisasi ekspansi NATO dilakukan dengan pemberian keanggotaan penuh (full membership) dan peluncuran beberapa program pra-keanggotaan penuh bagi negara-negara termasuk di kawasan Laut Hitam. Sejak bubarnya Uni Soviet, selusin negara di benua Eropa telah diterima seksesinya kedalam keanggotaan penuh NATO. Perluasan keanggotaan ini dibagi kedalam tiga ronde. Pertama adalah ronde 12 Maret 1999 yang menambahkan Republik Ceko, Slovakia, Polandia, dan Hungaria sebagai anggota baru NATO. Ronde kedua kemudian memperluas keanggotaan NATO hingga menjadi total 26 negara dengan masuknya Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania, Slovakia dan Slovenia pada tanggal 29 Maret 2004. Ronde terakhir berlangsung pada tanggal 1 April 2009 dimana dua negara Balkan, Kroasia dan Albania dinyatakan tergabung dalam NATO. Ketiga ronde tersebut secara khusus telah menunjukkan langkah konkrit ekspansi NATO ke kawasan Laut Hitam dengan masuknya dua negara pantai Bulgaria dan Rumania terlepas dari Turki yang sudah bergabung sejak tahun 1952. Ancaman dari ekspansi NATO di kawasan laut hitam sudah jelas dimulai dari masuknya Bulgaria dan Rumania ke dalam aliansi militer terkuat di dunia tersebut.

Namun yang paling penting adalah status negara-negara lainnya di kawasan Laut Hitam yang saat ini belum bergabung dengan NATO namun memiliki keinginan atau bahkan sudah mencapai tingkat kerjasama multibidang dengan NATO.

Ukraina merupakan negara utama di kawasan laut hitam dimana dua kekuatan Barat-Rusia saling berpacu untuk menanamkan pengaruhnya. Hubungan kedua belah sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Presiden Leonid Kuchma (1994-2005) dan semakin erat selama dibawah pemerintahan presiden Viktor Yuschenko yang pro-Barat. Pada tahun 1991, Ukraina bergabung dengan North Atlantic Cooperation Council. Ukraina kemudian menjadi negara yang pertama kali bergabung dalam program PfP di bulan Februari 1994. Titik tolak hubungan NATOUkraina dimulai pada tahun 1997 dalam penyelenggaraan KTT Madrid NATO dan Ukraina menandatangani Charter on a Distinctive Partnership yang menjadi landasan berdirinya Komisi NATO-Ukraina (NUC). Lima tahun kemudian, NUC mengadopsi Rencana Aksi NATO-Ukraina. Pada akhir tahun 2004, Ukraina harus mengalami revolusi pertamanya seperti Georgia yang sudah mengalami setahun sebelumnya. Hasil pemilihan umum presiden tahun 2004 yang memenangkan sosok pro-Rusia Viktor Yanukovich diprotes publik karena terindikasi terdapat kecurangan dan korupsi yang masif dalam pelaksanaannya. Komisi pemilihan Ukraina dengan dipantau oleh pengawas internasional kemudian mengadakan pemilihan ulang yang kemudian dimenangkan oleh Viktor Yuschenko.

Viktor Yuschenko membuka masa pemerintahannya dengan bergabungnya Ukraina dalam Intensified Dialogue pada bulan Okber 2005. Langkah ekspansi NATO ke Ukraina sempat terganggu dengan peristiwa tahun 2006 di Krimea. Ukraina-NATO berencana mengadakan latihan bersama namun kapal dagang berbendera Amerika Serikat SS Advantage dengan muatan untuk persiapan latihan bersama tersebut ditolak otoritas pelabuhan Feodosia, Krimea, untuk melaksanakan bongkat muat . Pada tahun 2008, negara-negara NATO menyetujui Ukraina untuk nantinya menjadi anggota penuh NATO. Berakhirnya masa Yanukovich setelah revolusi kedua pada akhir 2013 membuka peluang baru bagi kemajuan dalam kerjasama NATO-Ukraina.

Sementara itu, ekspansi Uni Eropa ke kawasan Laut Hitam dalam konteks keamanan tradisional tidak mengancam Rusia secara langsung bahkan selama era 90-an Rusia menganggap Uni Eropa sebagai pihak yang dianggap mampu mendukung proses transformasinya pasca bubarnya Uni Soviet. Uni Eropa sedikit lambat melakukan ekspansi ke eropa timur dan laut hitam dibandingkan NATO. Tahun 2004, Siprus, Republik Ceko, Slovakia, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, dan Slovenia bergabung ke Uni Eropa. Perluasan akhirnya memasuki kawasan Laut Hitam ketika Rumania dan Bulgaria dinyatakan tergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007. Kebijakan ekspansi Uni Eropa tertuang dalam satu kerangka besar kebijakan yang dikenal sebagai European Neighborhood Policy (ENP). Kebijakan ini diluncurkan tahun 2004 dan kini telah menghubungkan Uni Eropa dengan pemerintahan dari enam belas negara di timur dan selatan Eropa, tidak termasuk Federasi Rusia. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mendukung mitra Uni Eropa dalam hal penegakan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, sosial, dan meningkatkan hubungan antar masyarakat masing-masing pihak. ENP dalam perkembangannya juga menyentuh ranah politik, keamanan, dan perdagangan.

Langkah politik Uni Eropa untuk membawa Ukraina ke dalam pengaruh politiknya terbuka lebar sejak Ukraina mengeluarkan Undang-Undang tentang dasar-dasar kebijakan dalam dan luar negeri pada tanggal 1 Juli 2010 yang didalamnya mengamanatkan pengintegrasian dengan sistem politik, ekonomi, dan hukum Eropa untuk selanjutnya memperoleh keanggotaan penuh Uni Eropa. Sebelumnya, pada September 2008, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan rencana kerja samanya ke dalam sebuah Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Ukraina. Kerangka kerjasama yang komprehensif menuju akses Ukraina ke Uni Eropa selanjutnya juga tersusun melalui pengesahan Agenda Asosiasi Uni Eropa-Ukraina oleh Dewan Kerjasama Uni Eropa-Ukraina pada tanggal 24 Juni 2013 di Luxembourg.

Amerika Serikat dengan keadayaan kapabilitas politik, militer, dan ekonominya juga memiliki kepentingan untuk menciptakan dan mempertahankan hegemoninya di berbagai kawasan dunia termasuk kawasan Laut Hitam. Amerika Serikat adalah anggota sekaligus kontributor utama NATO, namun terkait ekspansinya politik dan militer ke kawasan tersebut, Amerika Serikat bertindak *one man show* dengan membangun kerjasama bilateral dengan setiap negara, meskipun pada akhirnya Amerika Serikat juga berusaha menjustifikasi ekspansinya dengan melabelinya sebagai bagian dari program NATO dan Uni Eropa. Penulis merumuskan setidaknya ada dua program utama bentukan Amerika Serikat sebagai manifestasi dari ekspansinya ke kawasan laut hitam, yakni: Joint Task Force East (Gugus Tugas Gabungan Timur) dan Ballistic Missile Defense System (Sistem Pertahanan Peluru Kendali Balistik). Intensitas ekspansi militer Amerika Serikat di Kawasan Laut Hitam meningkat dengan signifikan sejak akhir 2013 Amerika Serikat membangun pusat transit baru di pangkalan militer Mihail Kogalniceanu, Rumania. Pangkalan militer ini menggantikan pangkalan militer Manas di Kirgistan yang berakhir masa operasinya Juli 2014. Pusat transit ini mulai beroperasi penuh pada Februari 2014 dan Amerika Serikat telah menganggarkan hingga 20-an juta dollar untuk pembangunan dan pemeliharaan pusat transit baru tersebut. Kebijakan Amerika Serikat tersebut walaupun untuk sementara dinyatakan hanya diselenggarakan hingga akhir 2015, namun memiliki dampak yang signifikan pada keamanan kawasan laut hitam karena hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari pangkalan militer Sevastopol. Selain itu, Amerika Serikat juga berencana menempatkan beberapa kapal perangnya di Constanta, pangkalan angkatan laut Rumania yang berlokasi tidak jauh dari Mihail Kogalniceanu.

Pasca presiden Viktor Yaukovich melarikan diri ke Rusia pada Sabtu 22 Maret 2014, terjadi kekosongan kekuasaan sementara di Ukraina. Rusia memanfaatkan kesempatan ini dengan menganeksasi Semenanjung Krimea. Berselang enam hari kemudian pada tanggal 28 Maret 2014, Rusia resmi mengerahkan militer ke Semenanjung Krimea. Operasi yang berlangsung selama tiga minggu ini berjalan sukses tanpa ada perlawanan yang berarti dari militer Ukraina. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan operasi militer Rusia dengan mudah menguasai Krimea, yakni: pasukan Rusia yang memang sudah berada Krimea (Sevastopol), jarak yang tidak jauh dengan lokasi-lokasi strategis, dan perintah dari Ukraina kepada pasukannya untuk tidak melakukan perlawanan. Dengan demikian, sejak akhir Februari secara *de facto* Krimea berada dibawah kekuasaan Rusia.

Pada tanggal 18 Maret 2014 aneksasi Semenanjung Krimea resmi memasuki tahapan formal pertamanya. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Krimea,

Ketua Parlemen Krimea dan Ketua Dewan Kotamadya Sevastopol menandatangani rancangan undang-undang aneksasi Krimea yang kemudian dikenal sebagai perjanjian aneksasi Krimea . Aneksasi Semenanjung Krimea berdampak langsung terhadap perluasan wilayah daratan Rusia. Namun, perluasan wilayah darat ini hampir tidak berarti bagi Rusia karena Krimea berkontribusi kurang dari setengah persen dari luas teritorial Rusia. Signifikansi aneksasi Krimea dalam perspektif teritorial justru berada di wilayah perairan yang berada di sekeliling Semenanjung Krimea tersebut.

Posisi geografis Krimea yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh laut berkonsekuensi pada peningkatan yang sangat besar terhadap luas wilayah maritim Rusia di Laut Hitam dan juga di laut Azov. Rusia mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari kebijakan aneksasi tersebut melalui penguasaan aset militer, baik milik Rusia maupun milik Ukraina yang berada di wilayah Krimea. Rusia memiliki sejumlah besar aset militer di Krimea yang mencakup tentara, alutsista, dan beberapa fasilitas pendukung Sebagai konsekuensi dari keberadaan aset militer ekstrateritorial tersebut, Rusia harus membayar sejumlah kompensasi dan mendapatkan pembatasan terhadap kapasitas militer yang diizinkan untuk berada di wilayah Krimea tersebut. Namun demikian, setelah kedaulatan Krimea berubah menjadi milik Rusia setelah aneksasi tahun 2014, tidak ada lagi kewajiban yang dibebankan terhadap Rusia terkait berbagai kompensasi dan pembatasan. Dengan tidak berlakunya lagi kedua perjanjian diatas, maka Rusia mendapatkan kesempatan untuk mengalihkan sedikitnya 6 Milyar Dolar per tahun untuk penguatan armada laut hitam Rusia. Selain terbebas dari biaya dan batasan, armada laut hitam Rusia mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas yang signifikan pasca aneksasi tersebut. Penguatan ini berasal dari baik Rusia sendiri maupun dari aset militer Ukraina yang diambil alih. Berdasarkan perkiraan Kementerian Pertahanan Ukraina terdapat peralatan militer dengan total nilai sebesar US\$ 1.7 juta berada di Krimea dan sebagian besar diantaranya telah diambilalih oleh Rusia . Jatuhnya Krimea ke tangan Rusia sepenuhnya membuat seluruh Laut Hitam berada dalam lingkup kekuatan militer Rusia. Awal Desember 2014, Rusia telah memindahkan peluru kendali balistik taktis jarak pendek, Iskander ke Krimea untuk menggantikan sistem Tochka yang dipasang sebelumnya. Rudal dengan nama NATO SS-26 Stone ini memiliki jarak tembak hingga 500 km dan memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir .

Motivasi Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea pada tahun 2014 dapat dijelaskan akibatnya adanya ancaman terhadap pengaruh politik dan keamanan Rusia dari ekspansi politik dan militer barat ke kawasan Laut Hitam. Ekspansi ini dilakukan oleh tiga aktor internasional yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pakta Pertahanan Atlantik Eropa (NATO), Uni Eropa (EU), dan Amerika Serikat. Perluasan keanggotaan ke arah timur Eropa, termasuk ke kawasan Laut Hitam merupakan bentuk ekspansi politik NATO yang otomatis diikuti oleh ekspansi militer. Uni Eropa juga memperluas keanggotaannya hingga ke kawasan Laut Hitam. Ekspansi ini selanjutnya juga diikuti oleh ekspansi dalam bidang-bidang lainnya seperti ekonomi dan energi. Rusia mempunyai kepentingan yang kompleks di kawasan Laut Hitam. Melalui perluasan wilayah kedaulatan dan pengambilalihan serta penguasaan segala sektor, termasuk militer di Krimea, maka Rusia dapat mengurangi atau mengatasi ancaman-ancaman keamanan tersebut serta memperkuat pengaruh politiknya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Krimea memiliki keunggulan geografis dan strategis yang menjadikannya sebagai kunci keamanan kawasan laut hitam. Tentunya kebijakan aneksasi ini terlepas dari apakah ini

berhasil hanya pada jangka waktu tertentu atau mampu berdampak positif bagi Rusia untuk jangka waktu yang lebih lama. Ringkasnya, interaksi antara Rusia dan barat dalam sistem regional Laut Hitam melahirkan motivasi aneksasi tersebut.

Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia

Pada akhirnya, referendum Krimea dilakukan pada tanggal 16 Maret 2014. Namun hasil referendum dianggap tidak wajar, sekitar 96% pemilih di Krimea mendukung untuk bergabung dengan Rusia. (bbc.com, 2014) Setelah hasil referendum keluar, pada 18 Maret 2014 sebuah Undang-Undang tentang penggabungan Krimea dan Sevastopol ke Federasi Rusia ditandatangani di Moskow. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengakui pemberian kewarganegaraan Rusia kepada warga Ukraina dan orang-orang tanpa kewarganegaraan secara permanen yang berdomisili di Krimea dan Sevastopol. (President of Russia, 2014).

Meskipun hasil dari referendum 2014 tersebut menyatakan jika 96% masyarakat Krimea menginginkan untuk bergabung dengan Rusia, namun tindakan Rusia yang mengakui bergabungnya Krimea dianggap sebagai aneksasi karena adanya keterlibatan dan dorongan pihak Rusia didalamnya. Bahkan setelah peristiwa referendum pada 16 Maret 2014, Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) menerima banyak laporan tentang meningkatnya laporan pelecehan dan intimidasi terhadap masyarakat yang tidak mendukung referendum. (OHCHR, 2014)

Karena Rusia dinilai terlibat dalam proses referendum dan mengakui hasil referendum tersebut, maka Rusia dinilai melanggar Piagam PBB Artikel 2 (4) yang berbunyi: "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations". Selain itu, perjanjian multilateral dengan beberapa negara yang menegaskan dan menjamin kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina seperti memorandum Budapest yang juga turut dilanggar oleh Rusia. Atas pelanggaran tersebut, Uni Eropa kemudian menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut berupa pembatasan pinjaman dan investasi ; larangan impor dan ekspor perdagangan senjata ; larangan penjualan barang dan teknologi penggunaan ganda untuk militer Rusia ; dan larangan penjualan peralatan, teknologi, dan layanan untuk proyek pengembangan minyak yang terkait dengan deepwater, Arctic offshore, dan shale exploration. Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, tanggal 31 Juli 2014. Penjatuhan sanksi tersebut juga sesuai dengan prinsip dasar penjatuhan sanksi Uni Eropa yaitu,

"Sanctions should be targeted in a way that has maximum impact on those whose behaviour we want to influence. Targeting should reduce to the maximum extent possible any adverse humanitarian effects or unintended consequences for persons not targeted or neighbouring countries. Measures, such as arms embargoes, visa bans and the freezing of funds are a way of achieving this." (Council of The EU, 2004)

Uni Eropa terus berkomitmen untuk menstabilkan situasi di Krimea, maka dibuatlah kesepakatan untuk gencatan senjata melalui Perjanjian Minsk yang ditandatangani pada September 2015. Dalam Perjanjian Minsk hanya ada dua belah pihak yaitu Ukraina dan Rusia, sedangkan Perancis, Jerman, dan OSCE hanya mengawasi dan mengevaluasi. Namun tidak mudah untuk kembali menstabilkan situasi di Krimea,

karena setelah penandatanganan tersebut pelanggaran masih sering terjadi. Kemudian dibuat lagi perjanjian gencatan senjata baru, yang disebut Perjanjian Minsk II dan ditandatangani pada 11 Februari 2015. (Dreger, Kholodilin, Ulbrich, & Fidrmuc, 2016, hal. 4)

Rusia merupakan salah satu negara pemasok utama minyak dan gas di dunia. (Fungáčová, Eller, & Fidrmuc, 2014) Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan ekspor mereka, 2/3 dari ekspor dan lebih dari 50% pendapatan anggaran Rusia berasal dari komoditas minyak dan gas. Rusia juga diketahui sangat bergantung pada pasar Eropa, dengan 45% eksportnya ke Uni Eropa. Selain itu, lebih dari setengah anggaran Rusia berasal dari penjualan gas dan minyak ke Uni Eropa. Dari sisi Uni Eropa, perdagangan dengan Rusia mewakili hanya 9,7% dari total perdagangan Uni Eropa. (Ivan, 2014) Sehingga dengan adanya sanksi terkait pembatasan penjualan teknologi untuk proyek pengembangan minyak seharusnya akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri Rusia karena adanya sanksi ekonomi Uni Eropa cukup berpengaruh pada perekonomian Rusia.

Sanksi dari Uni Eropa cukup melemahkan ekonomi Rusia, ekspor Uni Eropa ke Rusia menurun 20,7% setiap tahun antara 2013 hingga 2016, sebelumnya ekspor mereka telah meningkat 20% per tahun antara 2009 hingga 2012. (Christen, Fritz, Sinabell, & Hinz, 2017, hal. 39) Pada tabel dibawah ini menunjukkan jika ekspor dan impor antara Uni Eropa dan Rusia sempat mengalami penurunan sejak 2014. Namun, pada tahun 2017 hingga 2019 ekspor dan impor antara Uni Eropa dan Rusia mengalami peningkatan kembali. Hal ini menunjukkan, meskipun Uni Eropa terus memperpanjang sanksinya namun hal tersebut tidak berpengaruh pada penurunan perdagangan yang signifikan antara Rusia dan Uni Eropa. Sanksi ekonomi dikeluarkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada pada tanggal 17 Maret 2014 melarang kunjungan beberapa elit politik Rusia dan membekukan aset-aset Rusia di luar negeri. Kemudian, Jepang menyusul dengan menunda pembicaraan mengenai militer, investasi, dan pembebasan visa antara kedua negara. Tekanan itu diharapkan bisa mendorong Rusia mengembalikan Krimea pada Ukraina. AS juga merilis daftar nama elit politik Rusia dan 17 perusahaan yang dikenai sanksi. Di antaranya adalah tokoh terkemuka di bidang perkapalan Arkady dan Boris Rotenberg, mantan pemilik Gunvor Oil Trading Company Gennady Timchenko, dan miliarder Yuri Kovalchuk. Bank Rossiya yang dimiliki oleh Kovalchuk juga terkena sanksi dari pemerintah AS. Imbasnya, Master Card dan Visa Internasional memblokir akses pemegang kartu Bank Rossiya ke jaringan mereka tanpa peringatan. Hal tersebut memberikan dampak berat yang dirasakan oleh perekonomian Rusia. Perusahaan-perusahaan Rusia, yang memegang dolar dan utang berdenominasi Euro, harus melunasi pinjaman mereka tanpa kemampuan untuk membiayai mereka kembali. Bank-bank Rusia yang ditargetkan oleh sanksi-sanksi Barat melihat aset luar negeri mereka membeku. Banyak perusahaan terpaksa menghentikan operasi dan mengurangi pekerjaan; beberapa bahkan membutuhkan suntikan modal pemerintah untuk bertahan hidup.

Sanksi keuangan dan kemunduran iklim investasi ini menyebabkan aliran modal keluar dan ekonomi Rusia menjadi melemah. Sanksi ekonomi terhadap Rusia memang telah memicu derasnya aliran modal yang keluar dari negara tersebut. Pada akhir 2014, menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, aliran keluar mencapai \$70-80 miliar. Selama kuartal pertama 2014, sektor swasta telah menarik keluar \$50,6 miliar dari Rusia,

padahal di tahun 2013 sektor swasta hanya menarik \$27,5 miliar (Yegorov, 2017). Kemudian, pada periode Januari-Maret 2015 para investor memindahkan saham mereka ke luar negeri dalam nilai yang sangat besar, yaitu \$60 miliar (Yueh, 2015).

Waktu itu, sanksi ekonomi Barat juga bertepatan dengan penurunan tajam harga minyak dunia. Hal tersebut semakin memperburuk kondisi ekonomi Rusia, karena sebagian besar ekonomi negara bergantung pada produksi komoditas, terutama minyak. Harga minyak anjlok dari lebih dari \$100 per barel menjadi di bawah \$35 per barel pada akhir 2015. Seperti yang dilansir oleh Thomson Reuters; Economist Intelligence Unit, setelah harga minyak ambruk pada akhir 2014, ekonomi Rusia jatuh ke dalam krisis. Sebuah krisis kredit membuat pemerintah menggunakan cadangan untuk menyelamatkan bank dan perusahaan. Foreign direct investment Rusia turun dari \$69 miliar di tahun 2013 menjadi hanya \$6,8 miliar pada tahun 2015 (The Economist, 2017).

Uni Eropa juga meneruskan kebijakan keras terhadap Rusia yang sejalan dengan pendekatan umum Barat terhadap Rusia. Menurut Uni Eropa, sanksi ini diperpanjang karena Rusia tidak secara penuh melaksanakan kesepakatan Minsk 2015 dengan tujuan mengakhiri konflik di Ukraina. Sanksi ekonomi Uni Eropa menargetkan bank, perusahaan minyak, dan sektor pertahanan Rusia. Berdasarkan sanksi yang telah diterapkan, juga oleh Amerika Serikat, perusahaan Eropa dilarang melakukan bisnis dan atau menanamkan modal pada industri pertahanan dan energi Rusia. Hubungan dalam bidang keuangan juga sangat dibatasi. Perusahaan Eropa dilarang meminjam dari atau meminjamkan uang kepada lima bank utama milik pemerintah Rusia selama lebih dari 30 hari, dalam upaya membatasi kesempatan bagi Rusia untuk mengumpulkan dana. Selain larangan berbisnis dengan perusahaan-perusahaan besar Rusia di bidang energi, ekspor peralatan terkait energi dan teknologi ke Rusia juga harus mendapat persetujuan oleh pemerintah negara-negara Uni Eropa (Parstoday.com, 2016)

Adanya sanksi tersebut menyebabkan stabilisasi harga komoditas tidak dapat menyelamatkan ekonomi Rusia. Dengan sanksi ekonomi yang menggelapkan prospek negara, nilai rubel Rusia dipotong menjadi dua sehingga bank sentral Rusia susah payah berusaha mempertahankannya, sampai dengan menghabiskan cadangan devisa sebesar \$200 miliar dalam usaha tersebut. Kemudian, dengan kekurangan barang impor dan lebih banyak rubel yang beredar, inflasi menjadi ancaman nyata; harga makanan naik drastis dengan daya beli orang Rusia biasa. Bank sentral Rusia lalu menaikkan suku bunga hingga 17% pada Desember 2014. Di tengah-tengah resesi ekonomi, dengan turunnya pendapatan dari produksi minyak Rusia, lonjakan pengeluaran mendorong anggaran pemerintah Rusia jauh ke dalam batas merah dan memicu potensi krisis ekonomi. Ketika dibutuhkan lebih banyak dana, Moskow menaikkan pajak dan menguras sepertiga dari asetnya sebelum harga minyak mulai stabil (The Economist, 2017).

Secara umum, sanksi AS dan Uni Eropa juga menargetkan industri pertahanan, intelijen, pertambangan, perkapalan, dan perkeretaapian serta membatasi kerja sama dengan bank dan perusahaan energi Rusia. AS juga menyatakan tetap menentang keras proyek gas Nord Stream 2 dan membatasi kemampuan presiden untuk meringankan sanksi terhadap Rusia karena dibutuhkan persetujuan kongres untuk mencabut sanksi apapun (Yegorov, 2017). Sanksi tersebut tidak menyebabkan Presiden Putin mundur, tetapi memang membuat keadaan Rusia menjadi lebih sulit. Rusia membalas sanksi Barat tersebut dengan menetapkan larangan impor daging, unggas, ikan, keju, buah, sayuran

dan produk susu dari Australia, Kanada, Uni Eropa, AS dan Norwegia. Selain itu, kehadiran sanksi Barat membuat pemerintah Rusia berinisiatif membangun sistem keuangan yang independen. Secara khusus, Rusia memiliki rencana meluncurkan sistem pembayaran nasional dan lembaga pemeringkat sendiri, termasuk di dalamnya mempertimbangkan berbagai opsi untuk bekerja sama dengan perusahaan Tionghoa.

Tidak hanya sanksi ekonomi. Barat juga menerapkan sanksi militer terhadap Rusia. Uni Eropa melarang negara-negara anggotanya menyuplai senjata dan perangkat keras militer untuk Rusia. Inggris dan Jerman menghentikan kerja sama militer dengan Rusia. Namun, sebenarnya sanksi Uni Eropa dalam kerja sama teknismiliter merupakan salah satu mata rantai terlemah dalam “perang” melawan Rusia. Ekspor persenjataan Eropa berjumlah tidak lebih dari satu persen dari jumlah total kontrak ekspor-impor Rosoboronexport perusahaan yang menjadi perantara Rusia dalam kerja sama persenjataan. Selain itu, Rusia sebenarnya adalah pemasok senjata dan peralatan militer yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Perusahaan industri pertahanan Rusia memiliki siklus produksi lengkap dari elemen dasar sampai produk akhir. Dengan demikian, sanksi Uni Eropa dalam kerja sama teknis-militer sebenarnya tak akan berdampak serius terhadap kemampuan pertahanan Rusia. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa ada kerugian justru dari pihak yang memberlakukan sanksi tersebut. London kehilangan \$133 juta dari pembatalan kerja sama penyediaan bahan untuk seragam militer Rusia. Jerman yang memasok senjata penembak jitu dan terlibat dalam pembangunan pusat pelatihan tempur digital di Mulino, Nizhny Novgorod, harus rela kehilangan \$100 juta.

Sementara itu, Prancis yang merupakan mitra militer terbesar Rusia awalnya masih bersikap memantau. Kontrak antara Rusia dan Prancis bernilai sangat tinggi. Penyediaan dua pengangkut helikopter kelas Mistral oleh perusahaan Perancis DCNS dan STX bernilai €1,2 miliar dan setengah dari jumlah tersebut telah dibayar oleh Moskow. Prancis juga berencana membangun dua unit kapal tambahan di Rusia. Selain itu, Paris dan Moskow terlibat dalam tiga kontrak besar untuk pasokan kendaraan lapis baja serta pesawat tempur Su-30MKI dan MiG-29K ke India yang bernilai jutaan euro. Namun, Perancis kemudian juga ikut menekan Rusia.

Respons Rusia terhadap Sanksi melalui Import Substitution

Ketegangan antara Rusia dan Uni Eropa setelah aneksasi Krimea dan sanksi ekonomi pada tahun 2014 mengakibatkan pihak Rusia melakukan peningkatan kedaulatan ekonomi Rusia. Sanksi Uni- Eropa telah menyebabkan kondisi domestik Rusia berubah dimana mereka mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan dari impor. Hal tersebut direalisasikan terhadap sektor pangan dimana sanksi ekonomi ini berdampak terhadap agenda ketahanan pangan Rusia yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dalam menghadapi sanksi ekonomi Uni-Eropa, pemerintah Rusia melakukan strategi Import Substitution untuk bertahan dan sebagai kepentingan nasional atas kedaulatan ekonomi Rusia.

Import Substitution merupakan strategi perdagangan untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor dengan barang produksi dalam negeri. Strategi ini didasarkan pada anggapan bahwa negara harus mengurangi ketergantungannya pada negara asing dengan mengembangkan produk dalam negerinya.

Kedaulatan ekonomi Rusia menjadi rapuh karena ketergantungan negara yang besar pada impor sektor pangan. Melalui Import Substitution akan mengurangi ketergantungan ini dan peningkatan kedaulatan ekonomi. Selain itu memungkinkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan menerapkan model pembangunan yang inovatif .

Import Substitution saat ini dikembangkan dalam konteks sanksi ekonomi yaitu sanksi terhadap sektor keuangan dan industri, termasuk larangan impor teknologi dan peralatan modern dan sanksi pembalasan Rusia terhadap produk makanan impor. Sehingga, Import Substitution bersifat anti sanksi dan bertujuan untuk menggantikan produk yang dilarang. Hal tersebut merupakan respon terhadap pengaruh faktor ekonomi asing yang kurang menguntungkan.

Dalam tulisan *Import Substitution and Economic Sovereignty in Russia* oleh Richard Cannolly dan Philip Hanson mengemukakan bahwa import substitution merupakan hal sehubungan dengan kebijakan ekonomi serta kebijakan luar negeri . Pada tahun 2015, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia naif untuk berpikir bahwa aturan ekonomi internasional tidak akan terkikis oleh politik. Hal ini harus mendorong Rusia untuk meningkatkan kedaulatan di bidang ekonomi. Kemudian, tugas Rusia adalah meningkatkan kedaulatan ekonomi dan pembangunan ekonomi Rusia sebagai negara dengan produktivitas ekonomi tinggi. Kedaulatan ekonomi ini akan dapat mengurangi kerentanan terhadap tekanan politik dari kekuatan asing. Kekhawatiran Rusia mengenai kedaulatan ekonomi mengakibatkan pada pengembangan Import Substitution. Strategi Import Substitution di kawasan strategis akan melindungi Rusia dari kemungkinan ancaman sanksi ekonomi dan embargo perdagangan oleh pesaing geopolitik.

Dalam tulisan *Import Substitution in the Economic Sectors of Russia* oleh V.K. Fal'tsman menjelaskan terkait Import Substitution Rusia pada jenis kegiatan ekonomi tertentu . Dalam sektor pangan, Rusia memiliki potensi pangan dan pertanian yang tinggi. Rusia mengekspor bahan makanan dan bahan mentah pertanian ke pasar dunia dengan jumlah total sekitar 17 miliar USD per tahun. Diantaranya sereal (lebih dari 6 miliar USD), ikan (2,7 miliar USD), dan minyak bunga matahari (1,7 miliar USD) mendominasi ekspor. Kemudian, impor bahan makanan melebihi ekspor lebih dari 2,4 kali dan mencapai 40 miliar USD. Neraca perdagangan luar negeri negatif adalah 23 miliar USD; Rusia menukar sebanyak ini di pasar dunia minyak dan produk ekspor lainnya untuk bahan makanan.

Selama periode embargo pangan, 2014-2017, impor dikurangi baik dalam bentuk barang maupun berdasarkan nilai. Pasokan daging unggas segar dan beku, ikan segar dan beku, gandum dan meslin, produk daging dan daging kaleng, gula mentah, gula putih dari impor menurun drastis. Kemudian, terdapat peningkatan produksi dalam negeri yang disebabkan oleh pembatasan perdagangan luar negeri dan perluasan tindakan dukungan negara karena berkurangnya pasokan dari luar negeri memberikan Import Substitution. Hasil Import Substitution terbaik selama periode embargo dicapai pada barang- barang seperti sayuran, kentang, babi, unggas, telur. Hasil Import Substitution terburuk diperoleh untuk barang-barang seperti daging sapi dan susu.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, langkah pertama yang dilakukan pemerintah Rusia dalam mengimplementasikan kebijakan substitusi impor adalah dengan

mengesahkan program “Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing”. Program ini dibentuk pada tahun 2014 dan diproyeksikan menunjukkan hasilnya di tahun 2020. Tujuan utama dari program ini antara lain untuk mengurangi produk impor, utamanya dari Uni Eropa, termasuk produk setengah jadi yang digunakan oleh produsen di Rusia. Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Rusia membuat langkah-langkah tambahan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan substitusi impor di bidang manufaktur dan pertanian.

Setelah kebijakan tadi secara sah dibentuk, salah satu industri pertama yang mengadopsi program substitusi impor adalah industri pertanian. Pada tanggal 27 Maret 2015, Kementerian Pertanian Rusia juga menyetujui daftar proyek investasi yang dirancang untuk mendukung keberhasilan program substitusi impor tersebut. Daftar ini mencakup 464 proyek dengan total alokasi biaya mencapai 265 miliar rubel. Pada tahun yang sama, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pembangunan Digital, Komunikasi, dan Media Massa, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi turut mengembangkan dua puluh program untuk mencapai substitusi impor di industri manufaktur sipil. Program-program itu nantinya disusul dua program lagi sebagai tambahan.

Penguatan Hubungan Strategis Rusia dengan Negara Mitra

Aneksasi ilegal Rusia terhadap Krimea tersebut telah menyebabkan krisis hubungannya Rusia dengan Barat. Barat berupaya menghukum Rusia agar merubah kebijakannya. Namun, tujuan ini tidak berhasil. Tekanan Barat terhadap Rusia ini ternyata justru membuat Rusia untuk semakin dekat dengan Tiongkok. Walaupun hubungan antara Rusia dengan Tiongkok bukan tanpa masalah, hal tersebut berusaha dihindari demi memberi akomodasi dan kompromi antara kedua great power ini.

Sanksi yang dijatuhkan Barat atas Rusia menyebabkan hubungan Rusia-Tiongkok kian menguat. Menariknya, masing-masing negara sebenarnya memiliki permasalahan. Moskow tengah menjadi sorotan dan dikritik oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat setelah menganeksasi Krimea dan diduga terlibat dalam konflik militer di timur Ukraina. Sementara itu, Beijing tengah menghadapi konflik sengketa wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan beberapa negara Asia Tenggara (Viva, 2014).

Rusia dan Tiongkok semakin saling semakin membutuhkan jika dilihat dari aspek demografis, populasi dan kepentingan politik. Hubungan antara Kremlin dan Beijing makin mesra dalam satu dasawarsa terakhir di tengah dominasi Amerika Serikat dalam stabilitas keamanan internasional. Selain saling berbagi tapal batas wilayah, keduanya juga kerap satu kata di Dewan Keamanan PBB dan tidak jarang bergantian mengirimkan senjata keperluan militer. Persahabatan keduanya benar-benar diuji saat Barat memberlakukan embargo ekonomi penuh terhadap Rusia (Klein & Wsetphal, 2014).

Pemerintah Vladimir Putin sudah sejak lama ingin menjual lebih banyak produk minyaknya ke Tiongkok, ditandai dengan negosiasi panjang antara perusahaan BUMN kedua negara, yakni Gazprom dan Tiongkok National Petroleum. Sampai sekarang, kata mufakat untuk kerja sama energi monumental memang belum terwujud karena alasan harga. Namun di tengah tensi politik terkini, kemungkinan besar Rusia mau menurunkan bandrol harga produk energinya sehingga perjanjian kerja sama bisa langsung ditandatangani. Dalam hal ini, Tiongkok memiliki posisi tawar yang bagus. Selain

serangkaian kerja sama ekonomi, Tiongkok juga merencanakan investasi langsung pada sektor gas di Rusia utara. Perundingan untuk itu sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun.

Pada tahun 2014, Putin berkunjung ke Tiongkok dan menandatangani sekitar 40 perjanjian ekonomi dengan Presiden Xi Jinping, termasuk kerja sama energi senilai \$400 miliar selama 30 tahun, mulai tahun 2018 (Deutsche Welle, 2014). Kedua negara juga setuju untuk menggunakan mata uang rubel dan yuan dalam transaksi perdagangan mereka. Dengan cara itu, Moskow dan Beijing akan mengesampingkan penggunaan dolar Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan akan memperlemah dominasi dolar sebagai alat tukar yang diakui dunia internasional.

Rusia yang sedang berseteru dengan Barat terkait krisis Ukraina justru memperoleh keuntungan finansial dan ekonomi terutama di bidang energi melalui kesepakatan dengan Tiongkok. Rusia tampaknya kian memalingkan wajahnya dari Barat dan sekarang menatap ke arah Timur, khususnya Tiongkok. Munculnya perubahan prinsipial dalam hubungannya dengan Barat telah mendorong Rusia untuk mengadopsi pendekatan baru. Pendekatan ini mengindikasikan penafsiran baru tentang kepentingan nasional Rusia dalam berhubungan dengan Timur dan kekuatan-kekuatan ekonomi baru dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Dengan kata lain, bersama Tiongkok Rusia sekarang mengincar banyak tujuan kolektif dalam kebijakan internasional. Oleh karena itu, para pemimpin kedua negara menekankan partisipasi strategis antara Moskow dan Beijing serta upaya untuk memperkuat sistem multipolar dunia. Singkat kata, hubungan Rusia dan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir mengalami banyak kemajuan dan kedua negara menjalin kerja sama bilateral dan multilateral yang luas, termasuk dengan memanfaatkan forum-forum internasional (Global Times, 2021).

Pada tahun 2015, pejabat pertahanan Rusia tampaknya lebih setuju untuk menjual senjata canggihnya kepada Tiongkok, yang tampaknya mengindikasikan pergeseran besar pemikiran Rusia mengenai penjualan senjata. Menurut Alexander Gabuev, Moskow melakukan tinjauan kebijakan setelah krisis Ukraina tahun 2014 dan menemukan bahwa industri pertahanan Tiongkok lebih maju dari yang diperkirakan sebelumnya. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa manfaat yang dapat diperoleh Tiongkok dari teknologi reverse-engineered Rusia kurang dari perkiraan sebelumnya, mengurangi risiko bahwa sistem reverse-engineered Tiongkok akan bersaing dengan sistem Rusia di pasar senjata global.

Selain itu, Gabuev mencatat bahwa Moskow menemukan banyak sistem yang diduga dicuri oleh Beijing telah benar-benar diperoleh melalui kontrak yang sah dengan perusahaan pertahanan Tiongkok dan peraturan lemah transfer teknologi Rusia ke Tiongkok. Faktor lain yang mungkin menyebabkan pergeseran Moskow untuk menjual senjata ke Beijing adalah ekonomi Rusia yang lemah dan isolasi yang semakin dalam dari Barat (Gabuev, 2016). Isolasi yang kuat dari Barat benar-benar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Rusia. Ekonomi Rusia memang mengalami penurunan yang signifikan sejak 2014- 2016. Maka, dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa upaya mempererat hubungan Rusia dan Tiongkok dijalankan semakin kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Rusia melalui perdagangan internasional.

Volume perdagangan bilateral yang berjumlah \$15,8 miliar pada tahun 2003 mencapai \$95,3 miliar pada tahun 2014, memberi harapan Rusia bahwa itu bisa segera mencapai \$100 miliar (Trade Statistic, 2016). Sementara Tiongkok pada saat itu menjadi mitra dagang pertama Rusia, volume perdagangan Tiongkok dengan Uni Eropa telah mencapai lebih banyak \$500 miliar pada tahun 2014, menandakan seberapa besar perbedaan di masing-masing kapasitas pasar Rusia dan Pasar uni Eropa (Perdagangan UE, 2009; Eurostat, 2015). Pada tahun 2014, EU (28 negara) masih terhitung 45,8% dari total ekspor Rusia dan 42,6% dari total impor. Tiongkok telah menjadi mitra dagang pertama Rusia, dengan nilai ekspor dan impor masing-masing sebesar 6,8% dan 16,9% (WTO, 2016; Malle, 2017).

Meski mengalami tren yang menggembirakan setelah 2009, volume perdagangan kedua negara mengalami penurunan tajam setelah tahun 2014. Perputaran perdagangan antara Tiongkok dan Rusia turun 27,8% menjadi \$ 64,2 miliar di tahun 2015. Nilai total ekspor Rusia ke Tiongkok turun pada tahun 2015 sebesar 19,1% menjadi \$31,4 miliar, menurut Huang Songping, juru bicara departemen bea cukai Tiongkok (Malle, 2017). Perdagangan luar negeri Rusia turun tidak hanya dengan Tiongkok, tapi secara umum, karena kombinasi antara turunnya permintaan dan harga untuk hidrokarbon (Lukin, 2016). Meskipun demikian, Rusia telah berhasil secara efektif mengarahkan ekonominya ke arah timur dan meningkatkan penetrasi pasar Tiongkok.

Upaya Uni Eropa untuk menekan Rusia juga membuat negara ini mengambil langkah mencari aliansi baru dan membangun kembali hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di timur, terutama Tiongkok. Rusia maupun Tiongkok sebenarnya memiliki kedekatan secara geografis dengan Asia Tengah. Keduanya memiliki kekhawatiran yang sama akan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Hubungan geopolitik dengan Tiongkok yang semakin dekat, serta kekhawatiran yang sama terhadap pengaruh AS di Asia Tengah, membuat Putin tak ragu merangkul Tiongkok sebagai negara mitra strategisnya.

Untuk membesarkan kembali kekuatan militer dan mengembalikan eksistensi keadidayaannya di mata internasional, Rusia memerlukan negara kuat yang mampu menunjang Rusia mencapai tujuan nasionalnya tersebut. Dalam hal ini, dengan kekuatan militer secara kualitas dan kuantitas persenjataan maupun pasukan militer yang sangat besar yang dimiliki, Tiongkok menjadi daya tarik bagi Putin untuk melakukan kerja sama militer dengan negara tersebut.

Tawaran kerja sama yang diajukan Putin disambut baik oleh Tiongkok. Pada tahun 2012-2013 Rusia kemudian mengintensifkan upayanya untuk memperkuat Angkatan Bersenjata di Distrik Militer Timur. Hal tersebut berhasil meningkatkan hubungan dengan Tiongkok. Evolusi hubungan militer Tiongkok-Rusia menuju tingkat kerja sama dan koordinasi yang lebih tinggi terbukti dalam tiga bidang utama keterlibatan pertahanan bilateral: (1) latihan militer, (2) operasi teknis militer, dan (3) kontak militer tingkat tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara di ketiga bidang tersebut semakin meningkat dan erat. Latihan bilateral dan multilateral reguler meningkat dalam kompleksitas, terutama dalam manuver, koordinasi, dan sistem senjata yang digunakan, terutama memperluas pertahanan rudal.

Demikian pula, kontak militer-kemiliteran bilateral semakin intensif dengan pertemuan pejabat pertahanan di tingkat yang lebih tinggi, serta memberikan kesempatan para pejabat militer untuk memfasilitasi paket persenjataan, mempersiapkan latihan militer, serta mendiskusikan berbagai masalah keamanan regional dan global (Meick, 2017). Hubungan militer antara kedua negara memiliki tujuh kontak tingkat tinggi pada tahun 2016, sesuai dengan tahun sebelumnya dan menandai pertemuan paling banyak tersebut sejak tahun 2008. Meskipun hanya ada dua pertemuan di tingkat atas, empat dari pertemuan tersebut melibatkan para perwira tingkat lanjut, yang mengindikasikan peningkatan pertukaran militer yang lebih tinggi. Hal ini dapat dipahami bahwa merencanakan latihan yang lebih besar dan lebih rumit antara Tiongkok dan Rusia serta meningkatkan kerja sama teknik militer memerlukan kepemimpinan, perencanaan, dan koordinasi tingkat atas yang lebih tinggi.

Di sela-sela KTT G-20 yang diselenggarakan di Hangzhou, Tiongkok, pada bulan September 2016, Presiden Xi mengatakan kepada Presiden Putin bahwa pertukaran militer seharusnya diperkuat, dan keduanya telah saling sepakat untuk meningkatkan pertemuan tingkat tinggi dalam beberapa tahun terakhir karena hubungan pertahanan semakin erat. Dengan para pemimpin masing-masing negara mendukung peningkatan kontak militer dan hubungan pertahanan yang lebih erat secara lebih luas, Tentara Pembebasan Rakyat (militer Tiongkok) dan Angkatan Bersenjata Rusia diharapkan dapat mengalami kontak tingkat tinggi yang lebih sering di tahun-tahun mendatang.

Rusia meyakini akan kemampuan Tiongkok dalam mengimbangi kekuatan AS di Asia Tengah karena Rusia memandang bahwa kekuatan Tiongkok terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pandangan Rusia, Tiongkok adalah negara yang semakin kuat dalam ekonomi, politik, dan militer. Jika Tiongkok terus mengalami perkembangan seperti itu maka kerja sama antara Rusia dan Tiongkok diharapkan juga akan terus mengalami peningkatan dan membuat kekuatan Amerika Serikat di Asia Tengah akan terus menurun secara relatif. Dengan demikian, kekhawatiran Rusia terhadap blok Barat akan semakin berkurang.

Bangkitnya kembali kekuatan militer Rusia sejalan dengan terus membesarnya kekuatan militer Tiongkok, membuat kedua negara ini semakin memperkokoh eksistensi mereka di kancah politik dunia. Ancaman kolektif yang dihadapi mendorong kedua great power ini untuk memperkuat kerja sama militer dengan membentuk aliansi strategis di bidang pertahanan. Hubungan ekonomi-militer yang paling signifikan antara kedua negara adalah perdagangan senjata.

KESIMPULAN

Dilengserkannya Presiden Viktor Yanukovich yang disebut sebagai pro-Rusia, mengakibatkan kemarahan dari pihak Rusia, dengan alasan presiden terpilih pengganti Viktor Yanukovich merupakan pihak yang pro-Eropa. Setelah pemilihan, pasukan bersenjata tanpa identitas mengambil alih wilayah Krimea dan mengadakan referendum agar wilayah tersebut bergabung dengan Rusia. Keterlibatan Rusia dalam konflik ini menyebabkan Uni Eropa memberi sanksi terhadap Rusia. Sanksi berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada Rusia, namun juga terhadap Eropa, karena pada dasarnya masing-masing pihak merupakan salah satu mitra dagang paling besar.

Rusia sebagai negara besar yang mendapatkan sanksi oleh Uni-Eropa atas kegiatan aneksasi di Krimea, Ukraina harus mampu untuk terus bertahan dalam segi pembangunan dan pengembangan ekonomi. Dengan kebijakan Import Substitution diharapkan aspek ekonomi dan pengembangan arah industri bisa berkembang lebih baik dan menolong Rusia dari Sanksi ekonomi yang diberikan. Berbagai kepentingan ekonomi dan kepentingan untuk melindungi negara dan rakyat, menjadi landasan utama mengapa Rusia mengembangkan industrialisasi dan ekonomi yang terpusat dari lokal, atau domestik. Kebijakan Import Substitution memberikan arah kebijakan yang berfokus pada ekonomi lokal dan pengembangannya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga bisa tercipta modernisasi ekonomi dan tercipta kemandirian ekonomi negara Rusia.

Negara Barat berupaya menekan Rusia dengan menerapkan sanksi terhadap Rusia. Sanksi tersebut berupa larangan penyediaan teknologi untuk eksplorasi minyak dan gas, larangan pemberian kredit kepada perusahaan minyak Rusia dan bank negara, serta pembatasan perjalanan pada warga Rusia berpengaruh yang dekat dengan Presiden Putin dan terlibat dalam aneksasi Krimea. Benar bahwa sanksi tersebut sempat memukul perekonomian Rusia, namun sanksi Barat ternyata memiliki konsekuensi strategis bagi hubungan internasional Rusia, yaitu penguatan hubungan ekonomi dan militer dengan Republik Rakyat Tiongkok. Menguatnya hubungan antara kedua great power tersebut berdampak penting bagi peta politik dunia kontemporer yang multipolar ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah, Djam'an Satori (2011). "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung, Alfabeta.
- Anthonius. P. Sitepu (2011). Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Baldwin, D. (1993). "Neorealism and Neoliberalis: The Contemporary Debate." (New York: Columbia University Press) hlm. 278.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). "Memahami Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rineka Cipta
- Coodes, See George. (1991). The Indianized States of Southeast Asia, (Honolulu: East-West Center Press,), in Douglas Allen and Ngo Vinh Long, Coming to Term; Indochina, the United States and the War, (United Kingdom: Westview Press, hlm. 91
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008 . Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta: Dephan RI, hal 18.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). "Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey" (4th Edition ed.). New York: Ed Addison Westlwy Longman
- Frederick H. Hartmann. (1967). "The Relation of Nations". New York: Macmillan

- John W ,Creswell. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kenneth N. Waltz. (1979). *“Theory of International Politics”*. New York: Random House
- Moleong, Lexy J. (2015). *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Munif, Achmad. (2007). *50 Tokoh Legendaris Dunia*, (Yogyakarta: Narasi)
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan, Mochamad Yani. (2005). *“Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.”* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rachmat, Angga Nurdin. (2015). *“Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin”*. Bandung; Alfabeta. Hal. 9.
- Robert Jackson & George Sorenson. (2013). *“Pengantar Studi Hubungan Internasional Edisi Kelima”*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Rosenau, James N. (1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*,. New York: The Free Press, 180-185.
- Rudy, Teuku May. (2002). *“Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin”*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeprapto. (1997) . *“Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku.”* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suci, Afred. (2011). *151 Konspirasi Dunia Paling Gila dan Mencengangkan!*, (Jakarta: Wahyumedia)
- Sudarsono, Juwono. (2007). *“Postur Pertahanan Negara.”* Kementerian Pertahanan RI. Jakarta, 25
- Sudarsono, Juwono. *“Doktrin Pertahanan Negara.”* Kementerian Pertahanan RI, Loc., Cit. hal. 104
- Sudarwan Danim.2002. *MenjadiPenelitiKualitatif*, Bandung :Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2006). *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.”* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2007). *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.”* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.”* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.”* Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *“Metode Penelitian Pendidikan.”* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Swantoro, P. (2007). *Masalalu Selalu Aktual*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,)

Vickery, Michael. (1991) "Cambodia", in Douglas Allen and Ngo Vinh Long, *Coming to Term; Indochina, the United States and the War*, (United Kingdom: Westview Press)

Artikel

Daniel S.papp, *Contemporary International Relations :Framework For Understanding*, (US Macmilan college,1994).

Fahmi, S. A., & Utomo, T. C. (2020). Analisis Keberlangsungan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia Yang Dianggap Menganeksasi Krimea Periode 2014-2019. *Journal of International Relations*, 6(4), 598-607.

Kartini, I. (2016). Aneksasi rusia di krimea dan konsekuensi bagi ukraina. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 15.

Lyubchenko, O. (2017). The Ukrainian Crisis. *Acta Politologica*, 9(1), 45-60.

Mahendra, I. I. (2022). Kebijakan Rusia untuk Bertahan Menghadapi Sanksi Ekonomi Uni-Eropa di Tahun 2016-2020 Melalui Strategi Import Substitution. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1).

Marples, D. R., & Duke, D. F. (1995). Ukraine, Russia, and the question of Crimea. *Nationalities papers*, 23(2), 261-289.

Muhammad, A., & Athifi, M. F. (2021). Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok. *Insignia: Journal of International Relations*, 8(2), 132-144.

Noorkusuma, F. K. (2017). ANALISA KEBIJAKAN INTERVENSI POLITIK RUSIA DI WILAYAH CRIMEA UKRAINA (PADA MASA VLADIMIR PUTIN TAHUN 2012-2014) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Wilson, A. (2014). *Ukraine crisis: What it means for the West*. Yale University Press.

Yekelchyk, S. (2020). *Ukraine: What Everyone Needs to Know®*. Oxford University Press, USA.